

Analisis Pemahaman Kepala Sekolah Dan Guru Terhadap Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah

Jagus¹, Kusnadi²

¹Bimbingan dan Konseling, SMAN 16 Makassar, Indonesia

²Bimbingan dan Konseling, SMPN 33 Makassar, Indonesia

Correspondence email: yagusyunus@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui: 1) Gambaran pemahaman kepala sekolah terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah; 2) Gambaran pemahaman guru mata pelajaran terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Melibatkan 24 sekolah dari sekolah yaitu 12 di sekolah SMP dan 12 di sekolah SMA di kota Makassar. Instrumen Penelitian menggunakan angket. Hasil penelitian bahwa pemahaman kepala sekolah sejumlah 25% yang tergolong kurang dan sebanyak 75% yang berada pada kategori sedang. Pemahaman kepala sekolah pada taraf kurang sebanyak 67%, pemahaman pada taraf sedang sebanyak 25% dan sejumlah 23% yang tergolong tinggi. Guru mata pelajaran di SMA yang memiliki pemahaman rendah sebanyak 8%. Pemahaman guru mata pelajaran pada taraf kurang sebanyak 17%, pemahaman guru mata pelajaran pada pada taraf tinggi sebanyak 25%. Guru mata mata pelajaran di SMP yang memiliki pemahaman rendah (0%). Pemahaman pada taraf kurang sebanyak 17%, pemahaman pada taraf sedang sebanyak 75% dan pemahaman guru mata pelajaran pada taraf tinggi sejumlah 23%. Simpulan : 1) Pemahaman kepala sekolah tentang bimbingan dan konseling baik di tingkat SMA dan SMP masih belum optimal; 2) Pemahaman guru mata pelajaran tentang Bimbingan dan Konseling di SMP maupun di SMA juga belum menunjukkan kategori yang tinggi lebih banyak pada kategori sedang dan rendah.

Kata Kunci : Pemahaman; Kepala Sekolah; Guru Mata Pelajaran; Bimbingan dan Konseling

Abstract. The research objectives were to find out: 1) an overview of the principal's understanding of the implementation of guidance and counseling in schools; 2) An overview of the subject teacher's understanding of the implementation of guidance and counseling in schools. Involving 24 schools from schools, namely 12 in junior high schools and 12 in high schools in Makassar city. The research instrument used a questionnaire. The results showed that the understanding of the principal is 25% which is classified as poor and as much as 75% is in the moderate category. The understanding of the principal at the low level is 67%, the understanding at the moderate level is 25% and a number of 23% is classified as high. Subject teachers in high school who have low understanding are as much as 8%. Subject teachers' understanding at a lesser level was 17%, subject teacher understanding at a high level was 25%. Subject teachers in SMP who have low understanding (0%). Understanding at the less level is 17%, understanding at the moderate level is 75% and understanding at the high level subject teacher is 23%. Conclusions: 1) The principal's understanding of guidance and counseling at the SMA and SMP levels is still not optimal; 2) The teacher's understanding of the subject of Guidance and Counseling in SMP and SMA also has not shown the high category more in the medium and low categories.

Keywords: Understanding; Headmaster; Subject teachers; Guidance and counseling



PENDAHULUAN

Dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA yang diterbitkan Kemendikbud (2016:10-12) bahwa ada enam aspek bimbingan yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial, aspek emosi, aspek moral dan aspek religius. Aspek fisik yang diinginkan sesuai tujuan pendidikan adalah sehat, aspek kognitif yang diharapkan adalah berilmu, aspek sosial berupa demokratis, aspek emosi dapat diasumsikan sebagai cakap, aspek moral diwujudkan dalam bentuk akhlak mulia dan tanggungjawab serta aspek religius yang menjadi tujuan nasional adalah beriman dan bertaqwa. Kemiripan dari aspek yang diharapkan dalam BK dan dijadikan sasaran atau tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa Bimbingan dan Konseling searah dengan tujuan pendidikan nasional. Kesesuaian tujuan pendidikan nasional dengan aspek dan bidang Bimbingan dan Konseling menunjukkan korelasi positif bagi perlunya pelaksanaan BK di sekolah.

Namun kenyataannya berbagai kendala yang timbul menjadikan profesi BK di sekolah belum sesuai dengan konsep tujuan keberadaannya. Gibson dan Mitchell (2011:60) juga mengakui bahwa bimbingan dan konseling merupakan profesi yang relatif muda karena baru lahir di abad ini. Keberadaan Bimbingan dan konseling sekarang yang dulu bernama Bimbingan dan penyuluhan dirasakan masih tergolong baru, bahkan hingga sekarang pemahaman terhadap fungsi BK masih sangat minim.

Awal mula keberadaan Bimbingan dan konseling menurut Prayitno dan Amti (2004:352-353) bahwa tahun 1964 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan baru didirikan di beberapa Institut Keguruan, dan tonggak sejarah mulainya keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah diawali dengan berdirinya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) oleh beberapa IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Baru pada tahun 1989 bersamaan dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/MENPAN/1989 tentang Angka kredit bagi

jabatan guru secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berdasarkan kurikulum 1994, sebutan guru BP menjadi Guru Pembimbing. Selanjutnya tahun 2008 terbitnya Permen 74 tahun 2008 baru secara tegas adanya penyebutan Bimbingan dan konseling atau konselor.

Walaupun secara formal sejak kurikulum 1975 Bimbingan dan penyuluhan sudah diberlakukan di semua tingkatan SD, SLTP dan SLTA. Namun fakta yang terjadi bahwa hingga saat ini hampir tidak ada guru BK yang diangkat untuk bertugas di SD. Hal ini tentu berbeda di Amerika dimana profesi Konselor sudah berkembang sangat luas dan jumlahnya banyak. Menurut Gladding (2012:46-47) bahwa terdapat 42.000 ribu konselor bersertifikat yang sudah bekerja di Amerika Serikat dan 50 negara lainnya. Gladding (2012:6-7) juga menyebutkan bahwa pada awal kehadirannya di sekolah sudah lebih banyak mengarah pada bimbingan karir misalnya pemilihan jurusan atau pekerjaan yang akan dipilih setelah tamat. Selanjutnya Bimbingan konseling juga menangani kesehatan mental, hubungan sosial, penyesuaian diri dan menangani masalah serius yang dialami seseorang.

Di Indonesia menurut Nursalim (2015:96) terjadinya beragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling menghadapkan konselor kepada konflik, ketidak-konsistenan dan juga ketidak-kongruenan peran. Konflik yang biasa terjadi di sekolah adalah seringkali guru BK diberi tugas untuk mendisiplinkan siswa. Padahal menurut Suparno dkk (2002:64) bahwa wakasek kesiswaan mengambil peran indisipliner dan hal-hal yang terkait dengan ketertiban serta penegakan tata tertib. Peran guru BK yang secara langsung memberi sanksi dan hukuman tentu bertentangan dengan kode etik BK dan juga mengganggu tugas profesional seorang guru BK.

Di samping itu, masih banyak guru BK yang tidak atau belum berusaha secara sungguh-sungguh untuk memerankan fungsi BK secara tepat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata tertib di sekolah. Dari hasil penelitian oleh

Baharuddin dan Jagus (2006:147) menunjukkan bahwa 62,5% guru pembimbing SMA Negeri di Makassar berperan menyimpang dalam menangani disiplin misalnya memberi sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah. Faktor utamanya adalah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah yang mengakibatkan guru BK mau tidak mau menerima dan melaksanakan perintah tersebut walaupun menyimpang dari profesionalitas tugas konselor sekolah.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa masih banyak pihak di sekolah yang pemahamannya masih kurang terhadap BK. Fakta tersebut menunjukkan adanya kendala eksternal dimana pihak lain belum memahami peran BK yang sesungguhnya. Salah satu bukti faktor eksternal dikemukakan oleh Nursalim (2015:96) bahwa masih ada kepala sekolah yang memberi tugas kepada konselor sekolah sebagai guru piket, pustakawan, petugas koperasi dan lain-lain yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan dan menjadikan BK dilakukan secara tidak profesional.

Prayitno dan Amti (2004:197-223) juga mengungkap fakta bahwa tumbuh kembangnya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah seringkali masih berupa harapan saja. Oleh karena itu konselor perlu tetap menjaga sikap profesional tanpa mengganggu hubungan dengan personil sekolah lain, saling menghargai dan kerjasama dengan kepala sekolah dan menerjemahkan peranannya dalam kegiatan nyata.

Fakta lain dikemukakan oleh Sukardi (203:97) yang menyatakan bahwa di beberapa sekolah sering dijumpai tugas dan layanan bimbingan hanya dibebankan kepada guru BK, sehingga berperan juga sebagai polisi atau jaksa sekolah. Hal ini bertentangan dengan tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling dimana kepala sekolah, Wali kelas dan guru mata pelajaran secara bersama-sama ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling tersebut sebagai team work.

Banyaknya keluhan guru BK tentang rendahnya pemahaman kepala sekolah dan guru mata pelajaran, menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya kinerja BK di sekolah. Salah satu penelitian pernah dilaksanakan oleh Dahmir dan Firdaus (2006:172) bahwa pemahaman guru mata pelajaran terhadap peran BK di sekolah lebih banyak pada taraf sedang yaitu 61,8%, dan pemahaman guru mata pelajaran terhadap fungsi BK sebanyak 53%

pada kategori rendah. Dari data ini menunjukkan rendahnya pemahaman guru mata pelajaran terhadap BK.

Oleh karena itu bagaimana pemahaman kepala sekolah dan guru mata pelajaran terhadap Bimbingan dan konseling di Makassar sangat penting dilakukan. Adanya data tentang sejauhmana pemahaman kepala sekolah dan guru mata pelajaran terhadap bimbingan dan konseling akan menjadi dasar bagi upaya yang lebih konkrit untuk mengetahui tentang kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan BK di sekolah.

Dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, menurut pendapat Ismaya (2015:27-44) ada berbagai jenis layanan dalam Bimbingan dan Konseling yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan dan layanan konseling. Dengan demikian, layanan informasi merupakan salah satu dari berbagai layanan dalam bimbingan dan konseling.

Namun dalam perkembangan berikutnya di tahun 2016, diterbitkan Panduan Operasional Penyelenggaraan BK SMA oleh Kemendikbud (2016:32-34) yang menyebutkan bahwa komponen program bimbingan dan konseling di SMA meliputi : (1) Layanan Dasar, (2) Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual peserta didik (3) Layanan Responsif, dan (4) Dukungan sistem.

Layanan dasar menurut Supriatna, (2014:69) adalah layanan bantuan bagi seluruh peserta didik melalui kegiatan di kelas atau di luar kelas dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan dasar adalah salah satu bentuk layanan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri yang optimal pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang pribadi, social belajar dan karir. Layanan dasar dapat dilaksanakan melalui layanan klasikal, kelas besar/lintas kelas, kelompok dan menggunakan media tertentu.

Bimbingan klasikal berdasarkan Panduan Operasional Penyelenggaraan BK SMA Kemendikbud (2016:61) diartikan sebagai kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik/konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor

dengan peserta didik/konseli. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik/konseli dan bersifat pencegahan. Metode bimbingan klasikal antara lain diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Materi layanan bimbingan klasikal meliputi empat bidang layanan Bimbingan dan Konseling diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan peserta didik/konseli yang meliputi aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir dalam kerangka pencapaian perkembangan optimal peserta didik dan tujuan pendidikan nasional.

Bimbingan Kelas besar/Lintas kelas menurut lampiran Permendikbud No.111 Tahun 2014 Tentang BK Dikdasmen (2014:62) menyebutkan bahwa Bimbingan kelas besar/lintas kelas merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik/konseli dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama dan atau berbeda sesuai dengan tujuan layanan. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Bimbingan Kelompok menurut Sukardi (2010:48) yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama memperoleh bahan dari narasumber tertentu yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Topiknya bersifat umum (*common problem*) dan tidak rahasia. seperti: cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, mengelola stress.

Layanan peminatan merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik/konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik/konseli belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Pelayanan peminatan mulai dari pemilihan dan penetapan minat (kelompok matapelajaran, matapelajaran, lintas minat), pendampingan peminatan, pengembangan dan penyaluran minat, evaluasi dan tindak lanjut. Strategi layanan peminatan meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual serta layanan konsultasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memimpin kolaborasi dengan pendidik pada satuan pendidikan,

berperan mengkoordinasikan layanan peminatan dan memberikan informasi yang luas dan mendalam tentang kelanjutan studi dan dunia kerja, sampai penetapan dan pemilihan studi lanjut.

Layanan Perencanaan Individual menurut Nurihsan (2014:18) perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu individu memahami pertumbuhan dan perkembangannya dan membuat dan mengimplementasikan rencana pendidikan karirnya. Selain itu Supriatna (2014:69) mendefinisikan layanan perencanaan individual sebagai layanan bantuan kepada semua peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik/konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya.

Layanan Responsif didefinisikan oleh Yusuf (2006:71) sebagai pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Dalam Pedoman BK pada Pendidikan Dasar dan Menengah (2016:12) Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Dalam prakteknya Strategi layanan responsif dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Konseling individual yaitu proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik/konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup dan keterampilan membuat keputusan;
- b) Konseling kelompok yang dilakukan dalam situasi kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah individu yang bersifat rahasia;
- c) Konsultasi yang merupakan proses pemberian masukan kepada konsulti atau upaya memperoleh dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program layanan.
- d) Kolaborasi

berupa kegiatan kerjasama interaktif antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain (guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain dan lembaga), yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling; e) Kunjungan rumah berupa kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam rangka melengkapi data, klarifikasi, konsultasi dan kolaborasi melalui pertemuan tatap muka dengan orang tua/wali peserta didik/konseli di tempat tinggal yang bersangkutan; f) Konferensi Kasus untuk membahas dan menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi peserta didik/konseli dengan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen.

Dukungan Sistem diartikan oleh Supriatna (2014:70) sebagai kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, meningkatkan program secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru/ahli, manajemen program penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem antara lain : a) Administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi, dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling; b) Kegiatan tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Dukungan Sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem antara lain (1) administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan asesmen, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi, dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling, serta (2) kegiatan tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling berupa : 1). Manajemen perencanaan;

2) Manajemen pelaksanaan; 3) Manajemen pengorganisasian; dan 4) Manajemen pengendalian. Keseluruhan manajemen tersebut dikontrol oleh kepala sekolah dan pengawas.

Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Menurut Tohirin (2015:61) pelaksanaan Bimbingan dan konseling Dalam Pedoman BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikbud 2016: 4-5) disebutkan bahwa ada 10 fungsi BK yaitu fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan atau penyembuhan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, dan fungsi advokasi. 6)

Dari berbagai fungsi BK tersebut, khusus yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tata tertib di sekolah terdapat tiga fungsi yang sering dilakukan yaitu fungsi pencegahan, advokasi dan fungsi perbaikan atau penyembuhan. Pencegahan yaitu membantu peserta didik/konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Perbaikan dan Penyembuhan yaitu membantu peserta didik/konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berfikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Advokasi yaitu membantu peserta didik/konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Namun untuk menjalankan seluruh fungsi tersebut membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orangtua peserta didik dan pihak lain yang relevan.

Pemahaman Kepala Sekolah dan guru tentang Bimbingan dan Konseling. Kajian tentang pemahaman kepala sekolah dan guru mata pelajaran masih minim, tetapi beberapa konsep tentang fungsi kepala sekolah dikemukakan oleh pakar pendidikan. Menurut Djumhur dan Surya (1975:75-120) menyebutkan tentang bahwa fungsi kepala sekolah dalam program BK adalah pengorganisasian BK dan fungsi administrasi. Sedangkan tanggungjawab kepala sekolah ada tiga yaitu : 1) memimpin guru-guru dalam menambah pengetahuan mereka untuk memahami tingkah laku siswa; 2) memperkenalkan kepada guru cara menolong siswa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik serta 3) memimpin

bawahannya untuk merencanakan dan menyelenggarakan penggunaan testing dan mengolah sekaligus mempergunakan hasilnya. Dalam mengelola BK perlu adanya organisasi yang baik. Organisasi yang baik tersebut sudah tentu memiliki personil dan tugas maupun mekanisme kerja yang jelas, didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana serta diikuti dengan pengawasan. Peran kepala sekolah dalam hal ini adalah penanggungjawab pelaksanaan secara teknis.

Berdasarkan kurikulum BK SLTP dan SMU tahun 1994, organisasi pelayanan bimbingan menguraikan tugas seluruh personil di sekolah yaitu kepala sekolah, Koordinator/guru pembimbing, Guru mata pelajaran/guru praktek, wali kelas/guru pembina, tata usaha dan BP3/komite sekolah. Khusus tentang tugas dan peran kepala sekolah menurut Sukardi (2000:53-55) kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksana teknis BK di sekolah dalam bentuk :

- 1) Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah, sehingga kegiatan pengajaran, pelatihan dan bimbingan merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis serta dinamis;
- 2) Menyediakan prasarana, tenaga, sarana dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan yang efektif dan efisien;
- 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling;
- dan 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan di sekolah kepada Kanwil/Kandep yang menjadi atasannya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan sangat menentukan dalam memberdayakan BK di sekolah.

Faktor manajemen yang juga cukup mendasar yang menjadi permasalahan adalah masih belum jelasnya peran BK dan peran wali kelas dalam berkoordinasi. Masih banyak anggapan salah dari wali kelas dan guru yang

menganggap bahwa semua masalah siswa ditangani oleh BK. Sehingga semua masalah terutama pelanggaran tata tertib lebih sering diarahkan penanganannya kepada guru BK. Hal ini terjadi karena selama ini guru BK sering tidak bekerja secara terencana sehingga justru lebih cenderung situasional dan terkesan "menunggu permasalahan". Berkaitan dengan masalah di atas menurut Sukardi (2003:130-133) di sinilah peran kepala sekolah dalam manajemen sekolah, dimana kegiatan yang dilakukan termasuk kinerja Bimbingan dan Konseling perlu dikordinasikan berupa adanya buah pikiran untuk kemajuan, saran, saling mengisi dan saling menunjang. Sehingga kepala sekolah tidak boleh mengabaikan seorang guru atau pegawai yang tidak berfungsi dan perlu menciptakan adanya hubungan kerja yang harmonis.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah survei, dimana angket diberikan kepada guru BK yang ada di sekolah masing-masing. Guru BK di SMP sebanyak 12, dan SMA juga 12, sehingga total adalah 24 guru BK.

Populasi dalam penelitian adalah sejumlah 24 sekolah sampel yaitu 12 di sekolah SMP dan 12 di sekolah SMA pada tahun pelajaran 2018/2019 di Makassar. Untuk memudahkan penilaian terhadap kepala sekolah dan guru mata pelajaran, peneliti memberikan angket kepada guru BK di sekolah masing-masing dengan menilai secara langsung berdasarkan hasil observasi atau pengetahuannya terhadap pemahaman kepala sekolah atau guru mata pelajaran di sekolahnya. Hal ini untuk memudahkan penelitian dan efektifitas perolehan data di lapangan.

Untuk mengetahui pemahaman kepala sekolah tentang bimbingan dan konseling dibuatkan angket dengan jumlah item sebanyak 20 item dengan rincian item angket sbb :

Tabel 1. Rancangan Instrumen Angket Penelitian Pemahaman Kepala Sekolah tentang BK di Makassar tahun 2018

No	Aspek yang diukur	Nomor item	Jumlah item
1	Layanan Dasar	1,2,3,4,5	5
2	Layanan Perencanaan Individual	6,7,8,9,10	5
3	Layanan Responsif	11,12,13,14,15	5
4	Layanan dukungan sistem	16,17, 18, 19, 20	5
Total			20

Untuk mengetahui pemahaman guru mata pelajaran tentang bimbingan dan konseling

dibuatkan angket dengan jumlah item sebanyak 20 item dengan rincian item angket sbb :

Tabel 2. Rancangan Instrumen Angket Penelitian Pemahaman guru mata pelajaran tentang BK di Makassar tahun 2018

No	Aspek yang diukur	Nomor item	Jumlah item
1	Layanan Dasar	1,2,3,4,5	5
2	Layanan Perencanaan Individual	6,7,8,9,10	5
3	Layanan Responsif	11,12,13,14,15	5
4	Layanan dukungan sistem	16,17, 18, 19, 20	5
Total			20

Untuk mengukur pemahaman kepala sekolah dan guru dibuat klasifikasi berdasarkan nilai yang diperoleh dari angket yang diberikan.

Dalam setiap item angket nilai maksimal adalah 4 dan minimal 1. Berikut kriteria pengukuran angket :

Tabel 3. Rancangan Instrumen Angket Penelitian Pemahaman guru mata pelajaran tentang BK di Makassar tahun 2018.

No	Aspek yang diukur	Jumlah item	Skor maksimal
1	Layanan Dasar	5	20
2	Layanan Perencanaan Individual	5	20
3	Layanan Responsif	5	20
4	Layanan dukungan sistem	5	20
Total			20

Kriteria pengukuran berdasarkan rancangan angket yang telah dibuat, maka disusun kriteria pengukuran yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Kriteria Pengukuran Angket Penelitian Pemahaman Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran tentang BK

Rentang skor	Kriteria	Keterangan
20-27	Rendah	Pemahaman tentang BK Rendah
28-45	Kurang	Pemahaman tentang BK Kurang
46-63	Sedang	Pemahaman tentang BK Sedang
64-89	Tinggi	Pemahaman tentang BK Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Kepala Sekolah tentang Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan hasil angket untuk kepala sekolah SMP yang dilakukan terhadap guru

Bimbingan dan konseling di sekolah masing-masing, diperoleh data bahwa tidak ada kepala sekolah yang memiliki pemahaman pada kategori rendah dan dan kategori tinggi (0%). Pemahaman kepala sekolah sejumlah 3 atau

25% yang tergolong kurang dan sebanyak 9 atau 75% yang berada pada kategori sedang.

Hasil angket yang telah dilakukan terhadap guru Bimbingan dan konseling untuk menilai pemahaman kepala sekolah di SMA masing-masing sekolah diperoleh data bahwa tidak ada kepala sekolah yang memiliki pemahaman rendah (0%). Pemahaman kepala sekolah pada taraf kurang sebanyak 8 atau 67%, pemahaman pada taraf sedang sebanyak 3 atau 25% dan sejumlah 1 atau 23% yang tergolong tinggi.

Dari hasil penelitian tersebut kepala sekolah SMP tidak ada yang masuk kategori tinggi pemahannya tentang BK, sedangkan Kepala sekolah SMA yang tergolong tinggi pemahannya hanya 23%.

2. Pemahaman Guru Mata pelajaran tentang Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan hasil angket yang telah dilakukan terhadap guru Bimbingan dan konseling di sekolah SMA untuk menilai guru di sekolahnya masing-masing, diperoleh data bahwa guru mata pelajaran yang memiliki pemahaman rendah sebanyak 1 atau 8%. Pemahaman guru mata pelajaran pada taraf kurang sebanyak 2 atau 17%, pemahaman guru mata pelajaran pada taraf tinggi sebanyak 3 atau 25%.

Hasil angket yang telah dilakukan terhadap guru Bimbingan dan konseling di sekolah SMP untuk menilai pemahaman guru mata pelajarannya masing-masing, diperoleh data bahwa tidak ada guru mata pelajaran yang memiliki pemahaman rendah (0%). Pemahaman guru mata pelajaran pada taraf kurang sebanyak 2 atau 17%, pemahaman pada taraf sedang sebanyak 9 atau 75% dan pemahaman guru mata pelajaran pada taraf tinggi sejumlah 1 atau 23%.

Dengan demikian secara umum pemahaman guru mata pelajaran terhadap bimbingan dan konseling di SMP dan SMA dapat dikatakan kurang, karena di SMP jumlah yang masuk kategori tinggi pemahannya hanya 23%, sedangkan SMA hanya 25%. Pemahaman guru mata pelajaran di SMP lebih banyak pada taraf sedang sebanyak 75%.

Pembahasan

Pemahaman kepala sekolah SMA dan kepala sekolah SMP terhadap Bimbingan dan konseling secara umum masih belum optimal karena kriteria pemahaman lebih banyak pada kategori sedang dan pada kategori tinggi masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu pertimbangan lebih lanjut dengan dampak yang terjadi karena pemahaman kepala sekolah belum optimal. Hal ini sebenarnya patut disayangkan karena peran kepala sekolah sebagai manajer di sekolah yang seharusnya mampu memahami dan mengelola BK akan sulit terwujud. Sebab menurut Sukardi (2000:53-55) bahwa kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksana teknis Bimbingan dan Konseling di sekolah dalam bentuk : 1) Mengkoordinasikan kegiatan yang diprogramkan di sekolah; 2) Menyediakan prasarana, tenaga, sarana terlaksananya pelayanan BK; 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan program BK; dan 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan di sekolah. Jika pemahaman kepala sekolah tentang bimbingan dan konseling belum optimal, maka realisasi dari beban dan tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala sekolah tidak atau sulit tercapai. Sebagai contoh, jika kepala sekolah kurang paham tentang BK, maka program yang direncanakan oleh guru BK akan sulit diimplementasikan.

Dari sisi lain, Prayitno dan Amti (Mortensen & Schmuller, 2004:199) menyebutkan bahwa bagi Konselor, mewujudkan fungsi pemahaman merupakan tugas paling awal setiap pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini menjadi tantangan bagi guru BK di sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA bahwa salah satu tugas utamanya adalah memberikan pemahaman tentang bimbingan dan konseling selain kepada siswa, juga kepada kepala sekolah. Dengan kondisi tersebut, tugas utama BK menjadi kurang fokus karena ada beban lain yang harus dilakukan yaitu memberikan pemahaman kepada kepala sekolah. Hal ini tentu menghambat kinerja guru BK di sekolah.

Sedangkan data bahwa guru mata pelajaran yang memiliki pemahaman tinggi pada tingkat SMA hanya 25% sedangkan di SMP hanya 23%. Pemahaman guru mata pelajaran di SMA pada kategori rendah sebanyak 8% sedangkan di SMP 0%. Hal ini menunjukkan sebaliknya dimana pemahaman guru SMP lebih baik dibanding di SMA. Hal ini membutuhkan penelitian lanjutan tentang adanya perbedaan tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman guru mata pelajaran masih tergolong rendah. Dengan kondisi tersebut tentu harapan untuk terciptanya kerjasama yang baik

antara guru BK dan guru mata pelajaran akan menjadi kendala. Hal ini sesuai pandangan Prayitno & Amti (2015:126) bahwa penanganan masalah siswa di sekolah justru terkait dengan pihak lain di sekolah termasuk guru. Oleh karena itu guru BK perlu menjalin kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam penanganan masalah yang dialami siswa. Problem tersebut tentu akan menjadi salah satu tugas tambahan bagi guru BK. Namun guru BK tentu sangat kesulitan jika kepala sekolah sebagai penanggungjawab Bimbingan dan Konseling kurang memahami tugas, fungsi dan peran BK yang sebenarnya.

Dengan demikian dari kedua fakta di atas sebenarnya sudah bisa menggambarkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan guru mata pelajaran masih belum optimal. Sebab angka yang ditunjukkan bahwa pemahaman dalam kategori tinggi sangat kurang, justru kebanyakan berada pada taraf sedang dan kurang. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi guru Bimbingan dan Konseling dalam pelaksanaan BK di sekolah. Sehingga kondisi di atas menjadi bahan pertimbangan bagi guru BK di sekolah agar program bimbingan di sekolah juga memprioritaskan kegiatan yang bisa memberikan pemahaman kepada kepala sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian adalah Pemahaman kepala sekolah tentang bimbingan dan konseling baik di tingkat SMA dan SMP masih belum optimal karena sebagian besar berada pada kategori sedang. Pemahaman guru mata pelajaran tentang Bimbingan dan Konseling di SMP maupun di SMA juga belum menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pemahaman guru mata pelajaran tentang BK di SMA yang berada pada taraf tinggi hanya 25% sedangkan di SMP pemahaman lebih banyak pada taraf sedang yaitu 75%.

Adapun saran yang diusulkan adalah Guru pembimbing sebaiknya menindaklanjuti berbagai temuan dalam penelitian ini agar masalah pemahaman kepala sekolah lebih meningkat. Guru pembimbing diharapkan memiliki cara cepat dan tepat untuk memberikan pemahaman tentang Bimbingan dan Konseling secara maksimal. Guru pembimbing perlu bekerjasama dengan stakeholder di sekolah dalam menangani masalah-masalah siswa

sekaligus mensosialisasikan kinerja BK yang sesuai dengan tugas dan pokoknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharuddin & Jagus, 2006. Peran Guru Pembimbing Dalam Penanganan Disiplin Pada SMA Negeri di Makassar. *Jurnal Ilmu Kependidikan*. Volume 3 Nomor 2 September 2006, LPMP, Sul-Sel, Makassar
- Dahmir & Firdaus, 2006. Pemahaman Guru Mata Pelajaran Terhadap Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Polewali. *Jurnal Ilmu Kependidikan*. Volume 3 Nomor 2 September 2006, LPMP, Sul-Sel, Makassar
- Gibson, Robert L dan Mitchell, Marianne H. 2011. Alih Bahasa Yudi Santoso. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gladding, T. Samuel. 2012. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta : PT. Indeks.
- Ismaya, Bambang.2015. *Bimbingan dan Konseling Studi, Karir dan Keluarga*. Bandung :Refika Utama.
- Gibson, Robert L dan Mitchell, Marianne H. 2011. Alih Bahasa Yudi Santoso. *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendikbud, 2016. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA. Jakarta: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Nurihsan, Juntika, 2014. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan*. Cetakan kelima, Bandung : Refika Aditama
- Nursalim, Mochamad. 2015. *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Erlangga

- Prayitno & Amti, Erman. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Cetakan kedua edisi revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Samad, Sulaiman & Daruma, A. Razak. 2004. *Profesi Keguruan*, Makassar : FIP, UNM.
- Sanjaya, Wina. 2014. *Media Komunikasi Pembelajaran*. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Soejipto dan Rafli Kosasi, 1999. *Profesi Keguruan*. Rineka Cipta, Jakarta (Soejipto dan Rafli Kosasi, 1999).
- Supriatna, Mamat. 2011. *Bimbingan dan konseling berbasis konseling*. Jakarta :Rajawali pers
- Sukardi, Dewa Ketut. 2010. *Pengantar Program Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2003. *Manajemen BK Di Sekolah*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2000, *Pengantar Pelaksanaan Program BK di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Sukardi, Dewa Ketut. 1983. *Organisasi dan Administrasi di Sekolah*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sukardi, Dewa Ketut & Kusumawati, Nila.2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2003. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung : Alfabeta
- Suparno, Paul dkk. 2002. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*, Jogjakarta : Kanisius.
- Suwardi dan Daryanto. 2017. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Tohirin. 2015. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*.Edisi Revisi. Jakarta : PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Tohirin.2015.*Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*. Edisi Revisi Cetakan.7.Jakarta: Radjagrafindo Persada
- Yusuf, Syamsu. 2006. *Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.